

## Formulasi Kebijakan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia

Abdul Rahman<sup>1,\*</sup>, Winda Dwi Astuti Zebua<sup>2</sup>, Evi Satispi<sup>3</sup>, Andrean Alan Kusuma<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

[\\*Email : abdul.rahman@umj.ac.id](mailto:abdul.rahman@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai tantangan dalam pengembangan dan upaya memajukan Sekolah Menengah Kejuruan yang meliputi: masih tingginya angka pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan, dan integrasi yang belum menyeluruh antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia industri/dunia kerja seperti: pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai dengan pemasaran lulusan. Obyektif penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis formulasi kebijakan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sementara pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital, dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan dengan kebijakan program SMK PK. Hasil penelitian menemukan bahwa formulasi kebijakan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan secara umum sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan rekomendasi untuk bahan perbaikan kebijakan program SMK PK yang meliputi: peningkatan sebaran sekolah pelaksana program SMK PK yang merata di seluruh Indonesia (tidak terpusat di sekolah yang ada di Pulau Jawa), pertimbangan pemilihan sekolah peserta SMK PK yang guru-guru produktifnya masih kurang, peningkatan kesiapan pelaksanaan program melalui pendampingan yang intensif, dan pengembangan kurikulum pendidikan SMK.

**Kata kunci:** Formulasi, Kebijakan Publik, SMK Pusat Keunggulan

### ABSTRACT

*This research is motivated by the discovery of various challenges in the development and efforts to advance Vocational High Schools which include: the high unemployment rate for Vocational High School graduates, and the incomplete integration between Vocational High Schools and the world of industry/work such as: curriculum development, learning process, evaluation of learning, and increasing absorption of graduates in the world of work. The objective of this research is to find out and analyze the policy formulation of the Center for Excellence Vocational High School (SMK PK) program in Indonesia. This research method uses a descriptive method with a qualitative approach, while data collection is done through digital observation, and documentation from various sources which relevant to the policy of the SMK PK program. The results of the study found that the policy formulation of the Center of Excellence Vocational High School program in general was quite good, but there were still some recommendations for improvement for the SMK PK program policy which included: increasing the distribution of schools implementing the SMK PK program evenly throughout Indonesia (not centralized in schools on the Java Island), consideration of the selection of participating SMK PK schools whose productive teachers are still lacking, increasing the readiness of program implementation through intensive mentoring, and developing the vocational education curriculum.*

**Keywords:** Formulation, Public Policy, Center for Excellence Vocational High School (SMK PK)

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran sentral dalam membangun bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, setiap negara berupaya merancang manifesto pendidikannya untuk mencapai tujuan itu. Dalam konteks Indonesia, menurut kajian yang dilakukan Bappenas (Bappenas, 2019), strategi pembangunan pendidikan Indonesia hingga tahun 2045 yang antara lain meliputi: peningkatan akses dan partisipasi pendidikan, pemerataan pelayanan pendidikan, dan peningkatan pendidikan vokasi.

Namun proyeksi tersebut masih dihadapkan pada masalah rendahnya daya saing inovasi dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan studi World Economic Forum (WEF) tahun 2019 dalam kerangka Global Competitiveness Report, Indonesia menempati peringkat ke-50 dari 141 negara di dunia. Meski posisi tersebut relatif baik, namun Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand (40), Malaysia (27), dan Singapura (1). Dari 13 indikator yang diukur, terdapat 2 indikator dengan nilai terendah yaitu kemampuan inovasi (38 poin) dan kompetensi sumber daya manusia (64 poin) (Schwab, 2019).

Berdasarkan data empiris tersebut, sistem pendidikan di Indonesia harus semakin ditingkatkan. Salah satu entitas pendidikan yang harus mendapat perhatian pemerintah adalah pendidikan vokasi, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan/SMK. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan vokasi (termasuk SMK) dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan memiliki keterampilan yang koheren dengan kebutuhan dunia kerja. Di sisi lain, seperti yang dikatakan Billet (2014), pendidikan vokasi (termasuk SMK) merupakan dimensi yang sangat signifikan dan berharga, tujuannya terutama diarahkan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi yang menonjol.

Pemerintah merespon urgensi pembangunan pendidikan di jenjang SMK dengan menetapkan pelbagai kebijakan seperti: (Amin, 2017; Pracihara, 2017; Sujadi et al., 2017), Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) (Pendidikan, 2018), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 (Kebudayaan, 2020), dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (Firman & Fathurrahman, 2021; Pudyastuti et al., 2022).

Namun demikian, meskipun berbagai produk kebijakan pendidikan SMK telah dibuat, namun output pelaksanaan pendidikan belum memenuhi harapan. Bahkan, lulusan pendidikan SMK merupakan penyumbang angka pengangguran tertinggi yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (2022) seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

**Tabel 1.** Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan 2	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	2019	2020	2021
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	2,39	3,61	3,61
SMP	4,72	6,46	6,45
SMA umum	7,87	9,86	9,09
SMA Kejuruan	10,36	13,55	11,13
Diploma I/II/III	5,95	8,08	5,87
Universitas	5,64	7,35	5,98

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Berdasarkan tabel tertera di atas, jelas terlihat bahwa lulusan pada jenjang pendidikan SMK masih menjadi jenjang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi selama 3 tahun terakhir berturut turut, dibandingkan jenjang-jenjang lainnya.

Selain itu, *link and match* antara SMK dengan dunia usaha/dunia industri sampai saat ini belum mengarah kepada terbentuknya kemitraan yang sinergis, baik dari sisi pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai dengan pemasaran lulusan belum dikembangkan secara sinergis dengan dunia usaha/dunia industri (Badan Pusat Statistik, 2022; Cahyanti & Indriayu, 2018;

Irwanto, 2021; Maulina & Yoenanto, 2022; Putranto, 2017).

Padahal pendidikan vokasi memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa (Rahman et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana formulasi kebijakan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia, khususnya dalam menghasilkan integrasi lulusan pendidikan SMK dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan pada cara orang menafsirkan, dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial individu, dengan berbagai risorsis seperti: penggunaan wawancara, buku harian, jurnal, observasi dan imersi untuk memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Eksplorasi ini berusaha untuk menjelaskan 'bagaimana' dan 'mengapa' fenomena sosial tertentu, atau program, beroperasi seperti dalam konteks tertentu (Groenland & Dana, 2020; L. Haven & van Grootel, 2019; Mohajan, 2018).

Sementara itu, sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini antara lain diperoleh dari: Observasi digital yang berasal dari *statement* pengampu kebijakan (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) SMK Pusat Keunggulan di aplikasi YouTube, kepustakaan yang berasal dari dokumen kajian riset terdahulu dan dokumen-dokumen beleid atau produk kebijakan lainnya yang terkait dengan SMK Pusat Keunggulan, serta hasil survei Indikator yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Di sisi lain, analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yang meliputi: pengorganisasian data, penggeneralisasian kategori, tema dan topik, pengkodean data, penerapan ide, tema dan kategorisasi data, pencarian alternatif penjelasan, dan penulisan serta penyajian laporan (McNabb, 2017). Pembahasan dalam

penelitian ini meliputi pentahapan perumusan kebijakan antara lain: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Perumusan Masalah

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, rumusan masalah dari program SMK Pusat Keunggulan ialah: 1) Perlu menyelenggarakan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan sebagai model satuan pendidikan bermutu; dan 2) Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, 2021) belum sesuai dengan kebutuhan pembaruan pembelajaran, sehingga perlu diganti (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, 2021).

Selain itu, berdasarkan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) pada saat *launched* program SMK Pusat Keunggulan (Kemdikbud RI, 2021), terdapat 5 poin latar rumusan masalah yang melatarbelakangi ditetapkannya kebijakan SMK Pusat Keunggulan yakni:

**Tabel 2.** Rumusan Masalah yang Melatarbelakangi Program SMK PK

No.	Rumusan Masalah yang Melatarbelakangi Program SMK PK
1	Kesempatan peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas SMK sesuai dengan kebutuhan dunia kerja masih sedikit
2	Sinergi pemangku kepentingan, termasuk dunia kerja pada program pengembangan SMK masih kurang
3	Belum semua SMK mengembangkan kurikulum bersama dunia kerja
4	Belum semua SMK memiliki fasilitas yang sesuai standar
5	Manajemen sekolah masih cenderung hal-hal administratif

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dianalisa bahwa justifikasi rumusan masalah pada kebijakan program SMK PK

sudah tepat. Terlebih bila dihubungkan dengan bukti empirik di bagian pendahuluan, bahwa jenjang SMK merupakan jenjang dengan penyumbang pengangguran tertinggi dibandingkan dengan jenjang lainnya. Poin-poin rumusan masalah yang termaktub, baik pada Kepmendikbudristek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, maupun pernyataan verbal Mendikbudristek pada peluncuran program SMK PK sudah relevan untuk menjawab tantangan sekaligus kebutuhan akan SMK yang lebih relevan dengan kebutuhan maupun perkembangan di dunia industri/dunia kerja.

### Agenda Kebijakan

Agenda kebijakan, atau dalam diskursus kebijakan publik sering disebut dengan *agenda setting* (penyusunan agenda) dipengaruhi oleh lingkungan komunikasi politik kontemporer, dimana arus informasi sangat luas dan cepat, serta konstelasi yang lebih sengit dari sebelumnya (Barberá et al., 2019; Williams et al., 2018). *Agenda setting* berkaitan dengan pengaruh media terhadap prioritas isu publik, pertanyaan utama untuk *agenda setting* politik adalah bagaimana pembuat kebijakan memprioritaskan isu untuk ditransformasikan menjadi tindakan kebijakan (Langer & Gruber, 2021).

Dalam konteks kebijakan program SMK PK, berdasarkan pernyataan Mendikbudristek pada saat peluncuran program SMK PK (Kemdikbud RI, 2021), penyusunan agenda utamanya tertera pada *framework* berikut ini:



**Gambar 1.** Framework Agenda Setting Kebijakan Program SMK PK

Berdasarkan *framework* tersebut, dapat dianalisa bahwa penyusunan agenda pada kebijakan program SMK PK

menitikberatkan pada transformasi pengembangan SMK yang dimulai sejak tahun 2019. Aspek inovasi sangat terlihat pada trajektori fokus dan sektor yang ditetapkan, dimana pada 2019 (dengan SMK Revitalisasi sebagai tema besar kebijakan) fokus kebijakan dititikberatkan pada peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar dunia kerja. Sementara itu, pada tahun 2020, dengan tema SMK *Center of Excellence*, fokus kebijakan bertransformasi menjadi peningkatan pembelajaran dunia kerja peningkatan kompetensi guru dan kepala SMK, serta sarana dan prasarananya. Secara kuantitas juga terdapat penambahan, dimana tahun 2019 hanya terdapat 300 sekolah sasaran kebijakan, namun di 2020 bertambah menjadi 491 sekolah.

Di sisi lain, pada kebijakan program SMK PK, meskipun fokusnya masih dititikberatkan pada sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM. Namun, terdapat 2 perubahan signifikan, yaitu: 1) Pembinaannya. Terdapat pembinaan dari Perguruan Tinggi, terutama dari Program Studi-Program Studi Vokasi di Politeknik-Politeknik yang hebat dan berkelas sebagai "kakak pembina" dari SMK PK; 2) Program SMK PK bisa diperpanjang hingga 3 tahun. Kedua perubahan besar tersebut merupakan evolusi dari pengembangan SMK (Kemdikbud RI, 2021).

Meskipun penyusunan agenda kebijakan pada program SMK PK sudah relatif bagus, namun yang perlu menjadi catatan kritis dan aspek introspeksi di kemudian hari ialah ketersebaran SMK peserta program SMK PK. Hal itu karena di program sebelumnya (SMK *Center of Excellence*) jumlah SMK peserta program masih tersentral di Pulau Jawa dengan persentase 66,4% (Rahman et al., 2021).

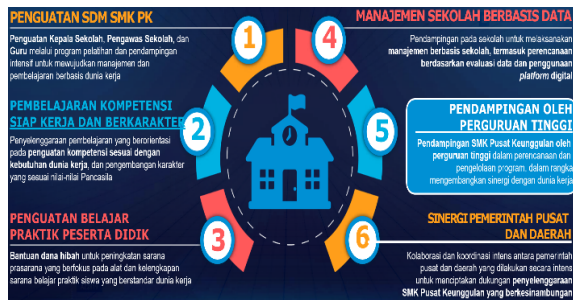
### Pemilihan Alternatif untuk Memecahkan Masalah

Pemilihan alternatif untuk memecahkan masalah merupakan aspek yang sangat krusial. Seperti halnya dampak akselerasi *recovery rate* atas resep yang tepat yang diberikan oleh seorang dokter, pemilihan alternatif yang tepat oleh perumus kebijakan untuk memecahkan



masalah merupakan prasyarat dihasilkannya kebijakan yang efektif, solutif, dan utilitatif.

Dalam kebijakan program SMK PK, rincian pemilihan alternatif pemecahan masalah tertera pada gambar di bawah ini (Kemdikbud RI, 2021):



**Gambar 2.** Enam Alternatif Kebijakan Program SMK PK

Keenam alternatif kebijakan program SMK tersebut didesain dalam rangka mencapai visi program SMK PK yaitu “menghasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja, serta menjadi rujukan/pengimbas dalam peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya”. Dari keenam alternatif kebijakan program SMK tersebut, dapat dianalisa sudah cukup komprehensif, terutama dalam konteks mencapai visi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, yang perlu menjadi *concern* dan atensi pengampu kebijakan SMK ialah mengawal implementasi kebijakan program SMK PK dari setiap alternatif kebijakan yang ada, terutama dalam hal SMK peserta program SMK PK untuk menjadi pengimbas/rujukan bagi SMK-SMK lainnya. Hal ini menjadi sangat krusial, terutama untuk menghindari (bahkan meng-*counter*) stigma/isu bahwa SMK PK merupakan program elitis bagi SMK-SMK tertentu saja. Hal itu menjadi krusial, mengingat ada tuntutan agar program SMK PK juga bisa menyasar bukan hanya ke SMK-SMK yang sudah lebih mapan, namun juga SMK-SMK yang kekurangan guru mata pelajaran produktif (Beritasatu.com, 2021; Jawapos.com, 2021). Selain itu, ada harapan tinggi dari

publik agar program SMK PK dapat mensinkronisasi sumber daya manusia dari SMK yang disiapkan dengan kebutuhan di lapangan (dunia industri) (Cnnindonesia.com, 2021).

**Penetapan Kebijakan**

Penetapan kebijakan merupakan aspek dimana kebijakan dilegalisasi. Kebijakan program SMK PK dituangkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 165/M/2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, 2021). Dalam beleid tersebut, obyektif, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan program SMK PK tertera pada gambar di bawah ini:

**Tabel 3.** Obyektif, Sasaran, dan Ruang Lingkup Program SMK PK

No.	Tujuan	Sasaran	Ruang Lingkup
1	Memperkuat komitmen antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah dalam pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan	Pemangku kepentingan di daerah	Sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan
2	Memperkuat kualitas sumber daya manusia SMK, antara lain kepala SMK, pengawas sekolah, guru, teknisi, dan tenaga administrasi untuk mewujudkan manajemen dan pembelajaran berbasis dunia kerja	Pengawas sekolah	Seleksi SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
3	Memperkuat kompetensi keterampilan nonteknis (softskill) dan keterampilan teknis (hard skills) peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Kepala SMK	Penetapan SMK sebagai pelaksana Program SMK Pusat Keunggulan
4	Mewujudkan perencanaan yang berbasis data melalui manajemen berbasis sekolah	Guru SMK	Pelaksanaan kegiatan Program SMK Pusat Keunggulan
5	Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kompleksitas pada sekolah dengan menggunakan platform digital	Tenaga kependidikan lainnya di SMK	Evaluasi penyelenggaraan Program SMK Pusat Keunggulan
6	Peningkatan sarana dan prasarana praktik belajar peserta didik yang berstandar dunia kerja		
7	Memperkuat komitmen dan kerja sama antara Kemendikbudristek dengan dunia kerja dalam pengembangan dan pendampingan Program SMK Pusat Keunggulan		

Meskipun dari sisi tujuan, sasaran, dan ruang lingkup kebijakan program SMK PK sudah cukup komprehensif, namun berdasarkan hasil survei Indikator yang bekerjasama dengan Kemendikbudristek, dari 486 responden entitas program SMK PK yang disurvei, ditemukan sebanyak 26,1% yang menyatakan mengalami kendala dalam persiapan program SMK PK yang meliputi sosialisasi program, proposal, dan seleksi. Setelah diperdalam, kendala tersebut terutama meliputi: keterbatasan SDM, penyesuaian dengan kurikulum dan program yang baru, sosialisasi yang kurang, dan waktu pelaksanaan program yang terbatas. Selain itu, ditemukan juga sebanyak 33,1%

responden menyatakan mengalami kendala dalam alur pelaksanaan program SMK PK. Rincian kendalanya terutama meliputi: waktu pelaksanaan program yang kurang, pencairan dana yang lambat (tidak langsung 100%), dan pendampingan yang masih kurang (Indikator, 2021).

Berdasarkan data-data saintifik tersebut, dapat dianalisa bahwa seyogyanya kebijakan program SMK tidak berhenti sampai di legalisasi kebijakan, namun juga *monitoring* atau pengawalannya pasca legitimasi kebijakan. Bahkan, pengawalan perlu intens dilakukan di tahap implementasi kebijakan/program, sampai dengan tahap evaluasinya. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa setiap obyektif dan /atau klausul yang tertera pada Kepmendikbudristek Nomor 165 tahun 2021 dapat tercapai dengan baik. Hal itu juga merupakan bagian dari akuntabilitas Kemendikbudristek sebagai institusi pencetus dan pengampu kebijakan program SMK PK.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) di Indonesia secara umum sudah baik. Namun demikian terdapat beberapa rekomendasi yang patut menjadi bahan masukan untuk perbaikan kebijakan program SMK PK yang meliputi: sebaran sekolah pelaksana program SMK PK yang merata di seluruh Indonesia (tidak terpusat di sekolah yang ada di Pulau Jawa), pertimbangan pemilihan sekolah peserta SMK PK yang guru-guru produktifnya masih kurang, peningkatan kesiapan pelaksanaan program melalui pendampingan yang intensif, agar semua ruang lingkup dalam kerja sama antara SMK PK dengan industri dapat terlaksana dalam upaya untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMK oleh mitra industri. Selain itu, pengembangan kurikulum pendidikan SMK juga perlu dilakukan agar siswa SMK memiliki *hardskill* dan *softskill* yang memadai,

sebagai bekal untuk masuk di dunia industri.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), baik Rektor dan para Wakil Rektor, juga Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMJ yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini, terutama dari sisi pendanaan/anggaran. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Kemendikbudristek yang telah berinisiatif menetapkan kebijakan program SMK PK, yang memiliki obyektif yang bagus sekali dan diharapkan dapat memberikan kontribusi riil terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, terutama pada jenjang SMK.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. M. (2017). *Strategi implementasi Revitalisasi SMK: 10 langkah Revitalisasi SMK*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2019-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/6/1/179/1/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-tingkat-pendidikan.html>
- Bappenas. (2019). *Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur*. [https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045\\_Final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Ringkasan%20Eksekutif%20Visi%20Indonesia%202045_Final.pdf)
- Barberá, P., Casas, A., Nagler, J., Egan, P. J., Bonneau, R., Jost, J. T., & Tucker, J. A. (2019). Who leads? Who follows? Measuring issue attention and agenda setting by legislators and the mass public using social media data. *American Political Science Review*, 113(4), 883–901.

- Beritasatu.com. (2021, March 17). *P2G: SMK Pusat Keunggulan Belum Sentuh Persoalan Fundamental*. <https://www.beritasatu.com/archive/747225/p2g-smk-pusat-keunggulan-belum-sentuh-persoalan-fundamental>
- Billett, S. (2014). The standing of vocational education: Sources of its societal esteem and implications for its enactment. *Journal of Vocational Education & Training*, 66(1), 1–21.
- Cahyanti, S. D., & Indriayu, M. (2018). Implementasi Program Link and Match dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri pada Lulusan Pemasaran SMK Negeri 1 Surakarta. *Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2).
- Cnnindonesia.com. (2021, March 24). *Program SMK Pusat Unggulan Nadiem Dikritik Tak Jawab Masalah*. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210323151610-20-621040/program-smk-pusat-unggulan-nadiem-dikritik-tak-jawab-masalah>
- Firman, F., & Fathurrahman, F. (2021). Pendampingan SMK Pusat Keunggulan Ekonomi Kreatif SMKS YAPIS Timika Papua Program Unggulan Teknik Komputer Jaringan. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 38–42.
- Groenland, E., & Dana, L.-P. (2020). *Qualitative methodologies and data collection methods: Toward increased rigour in management research*. World Scientific.
- Indikator. (2021). *Survei Penguatan Pendidikan Vokasi*.
- Irwanto, I. (2021). Link and Match Pendidikan Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Industri Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 549–562.
- Jawapos.com. (2021, March 19). *SMK Pusat Keunggulan Disebut Tak Selesaikan Masalah Pendidikan Vokasi*. <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/03/2021/smk-pusat-keunggulan-disebut-tak-selesaikan-masalah-pendidikan-vokasi/>
- Kebudayaan, K. P. (2020). *Rencana strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*.
- Kemdikbud RI. (2021, March 17). *Merdeka Belajar Episode 8: Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan*. <https://www.youtube.com/watch?v=8EoLVdaaMrQ>
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, (2021). [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, (2021).
- L. Haven, T., & van Grootel, D. L. (2019). Preregistering qualitative research. *Accountability in Research*, 26(3), 229–244.
- Langer, A. I., & Gruber, J. B. (2021). Political agenda setting in the hybrid media system: Why legacy media still matter a great deal. *The International*

*Journal of Press/Politics*, 26(2), 313–340.

Maulina, M. M., & Yoenanto, N. H. (2022). Optimalisasi link and match sebagai upaya relevansi SMK dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(1).

McNabb, D. E. (2017). *Research methods in public administration and nonprofit management*. Routledge.

Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23–48.

Pendidikan, K. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan*. Jakarta.

Pracihara, B. (2017). Instruksi Presiden No 9 tahun 2016 (Revitalisasi SMK) memacu SMK bidang seni dan industri kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif. *Seminar Nasional Seni Dan Desain 2017*, 313–319.

Pudyastuti, E., Ginting, R. S., & Ginting, M. (2022). Sosialisasi Program SMK Pusat Keunggulan pada SMK Immanuel. *Pubarama: Jurnal*

*Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Putranto, I. (2017). Pengembangan model kerja sama link and match untuk meningkatkan kesiapan kerja bagi lulusan smk kompetensi keahlian akuntansi di Kota Semarang. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 1(1), 68–83.

Rahman, A., Zebua, W. D. A., Satispi, E., & Kusuma, A. A. (2021). Policy Formulation in Integrating Vocational Education Graduates with the Labor Market in Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 12(3), 331–371.

Schwab, K. (2019). *The Global Competitiveness Report*. World Economic Forum. [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GlobalCompetitivenessReport2019.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport2019.pdf)

Sujadi, I., Kusuma Wardani, D., Rahmawati, A., & Maryono, D. (2017). *Pola kebijakan pengembangan guru produktif berdasarkan inpres nomor 9 tahun 2016*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Williams, C. B., Fedorowicz, J., Kavanaugh, A., Mentzer, K., Thatcher, J. B., & Xu, J. (2018). Leveraging social media to achieve a community policing agenda. *Government Information Quarterly*, 35(2), 210–222.